

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran pendidikan sangat signifikan bagi setiap individu. Dengan pendidikan, setiap individu dapat memperoleh berbagai pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk hidup di tengah-tengah masyarakat (Jurdil & Purnamatati, 2023). Di samping itu, pendidikan juga memiliki peran penting bagi setiap bangsa untuk dapat berkembang dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan teknologi (Jacob dkk., 2022). Menyadari pentingnya pendidikan, sebagian besar negara memberlakukan kebijakan wajib mengikuti pendidikan dengan biaya gratis bagi warga negaranya. Indonesia menjadi salah satu negara yang memberlakukan kebijakan tersebut, hal itu tertulis dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab IV Pasal 6 Ayat 1.

Setiap negara pasti membuat kurikulum dalam menjalankan pendidikannya. Saylor dan Alexander (1956) memandang kurikulum sebagai semua upaya satuan pendidikan dalam mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik yang dilakukan di dalam atau luar kelas (Laksono & Izzulka, 2022). Krug (1960) memandang kurikulum sebagai metode dan upaya untuk mencapai tujuan persekolahan (Heryati & Muhsi, 2014). Albery (1965) berpendapat bahwa kurikulum mencakup segala aktivitas yang disediakan oleh sekolah untuk peserta didik (Heryati & Muhsi, 2014). Ketiga pandangan tersebut menggambarkan kurikulum sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan yang bertujuan membentuk pengalaman belajar bagi peserta didik upaya mencapai tujuan tertentu. Secara konstitusi, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum didefinisikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang memuat perencanaan, isi, bahan ajar, dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu (Depdiknas, 2003).

Idealnya, kurikulum akan selalu berkembang dan mengalami penyempurnaan untuk perencanaan lebih baik, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, meningkatkan mutu pendidikan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mencapai tujuan pendidikan (Ananda & Hudaidah,

2021; Hidayah, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, kurikulum di Indonesia terus mengalami penyempurnaan dan perubahan. Sebagaimana halnya di tahun 2022 kurikulum merdeka dirilis sebagai penyempurnaan dari Kurikulum 2013. kurikulum merdeka secara signifikan mengalami banyak perubahan dari Kurikulum 2013 dalam berbagai aspek. Perubahan tersebut terletak dari aspek kerangka dasar kurikulum (Martatiyana dkk., 2023).

Kurikulum 2013 dirancang berdasarkan hasil pengembangan dari model Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang pertama kali diperkenalkan di tahun 2004, serta merupakan penyesuaian dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 (Hidayat, 2023). Tujuan utama Kurikulum 2013 yaitu meningkatkan dan menyelaraskan kompetensi dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pemerintah merancang Kurikulum 2013 dengan beberapa tujuan utama, seperti menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, berpikir kritis, beradaptasi dalam masyarakat global, siap terjun ke dunia kerja, serta memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial (Hidayat, 2023). Salah satu perbedaan signifikan antara KTSP dan Kurikulum 2013 yaitu penerapan pembelajaran tematik integratif pada KTSP yang dilakukan dari kelas 1 hingga kelas 3, sedangkan di Kurikulum 2013 diterapkan dari kelas 1 hingga kelas 6 (Hidayat, 2023). Di samping itu, Kurikulum 2013 lebih menitik beratkan pada penyederhanaan dan penerapan pembelajaran tematik integratif yang didasari pada pendekatan saintifik. (Hidayat, 2023; A. N. Rahmawati, 2018).

Kurikulum merdeka merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 2013 berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan. Tujuan dari kurikulum ini adalah mengejar ketertinggalan pembelajaran yang telah berlangsung lama (Suherman, 2023). Kurikulum ini memiliki dua kegiatan utama yaitu kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler. Kegiatan intrakurikuler fokus pada berbagai mata pelajaran dengan penekanan pada konten esensial tujuannya agar peserta didik memiliki waktu yang lebih leluasa dalam pemahaman konsep dan peningkatan kompetensi (Nurani dkk., 2022). Sementara kegiatan kokurikuler dirancang dalam bentuk proyek, yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) untuk menggambarkan karakter dan mengembangkan kompetensi peserta didik

berdasarkan nilai-nilai leluhur pancasila, dengan tujuan dapat menjawab tantangan karakter dan kompetensi yang dibutuhkan di abad-21 (Irawati dkk., 2022).

Kurikulum merdeka hadir sebagai respons pemerintah terhadap krisis pembelajaran yang telah berlangsung lama dan semakin parah ketika pandemi Covid-19 melanda. Menyikapi hal tersebut pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Tindakan tersebut dilakukan dengan maksud memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan agar dapat memilih kurikulum yang cocok dengan kebutuhan para peserta didik. Dalam situasi tersebut, satuan pendidikan diberi tiga pilihan untuk menerapkan kurikulum di sekolah, yaitu: 1) mengadopsi kurikulum 2013 sepenuhnya, 2) menggunakan kurikulum darurat yang merupakan penyederhanaan dari kurikulum 2013 yang telah disusun oleh pemerintah, atau 3) melakukan penyederhanaan kurikulum 2013 sendiri (Kemendikbudristek RI, 2020a). Berdasarkan hasil survei Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), pembelajaran selama pandemi di tingkat pendidikan dasar dan menengah menunjukkan bahwa 59,2% sekolah masih mengikuti kurikulum 2013 sepenuhnya, 31,1% mengadopsi kurikulum darurat, sementara 8,9% melakukan penyederhanaan kurikulum 2013 secara mandiri, dan 0,4% menggunakan kurikulum lainnya. (Anggraena dkk., 2021).

Adapun hasil pembelajaran dari data tersebut menunjukkan bahwa peserta didik yang dibelajarkan dengan kurikulum darurat mendapatkan capaian pembelajaran yang lebih baik dibanding peserta didik yang dibelajarkan dengan kurikulum 2013, di mana selisih skor numerasi dan literasinya setara dengan 4 bulan pembelajaran (Anggraena dkk., 2021). Atas dasar itu pemerintah melakukan evaluasi pada Kurikulum 2013, kemudian pemerintah mengidentifikasi bahwa dibutuhkannya kurikulum yang sederhana, mudah diimplementasikan, *decentralized* dan fleksibel. Berangkat dari hal itu, pemerintah merancang kurikulum merdeka untuk menjawab tantangan tersebut, dengan begitu kurikulum tersebut menjadi satu dari tiga opsi pilihan kurikulum yang dapat diadopsi oleh satuan pendidikan (Anggraena dkk., 2021). Dengan demikian kurikulum merdeka

mulai berlaku dan menjadi opsi implementasikan kurikulum pada tahun ajaran 2022/2023 (Kemendikbudristek RI, 2022; Nursalam dkk., 2023).

Pemerintah memberikan tiga opsi pilihan bagi satuan pendidikan untuk melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Opsi tersebut dapat dilakukan bertahap sesuai kesiapan dari satuan pendidikan tersebut. Pilihan pertama yaitu Mandiri Belajar, dalam hal ini satuan pendidikan tetap menggunakan kurikulum yang sedang diimplementasikan, namun mengadopsi beberapa elemen dari kurikulum merdeka. Pilihan kedua yaitu Mandiri Berubah, satuan pendidikan mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan memanfaatkan perangkat ajar yang telah tersedia. Pilihan ketiga yaitu Mandiri Berbagi, satuan pendidikan mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan menyusun perangkat ajar secara mandiri. Per tanggal 11 November 2023, implementasi kurikulum merdeka telah dilakukan oleh 130.648 SD/sedereajat di Indonesia, 390 di antaranya di Kabupaten Purwakarta (Puskurjar, 2023). 390 satuan pendidikan tersebut terdiri dari 25 sekolah dalam kategori Mandiri Belajar, 358 sekolah dalam kategori Mandiri Berubah, dan 7 sekolah dalam kategori Mandiri Berbagi.

Dalam implementasi kurikulum merdeka, tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai kendala yang dialami oleh satuan pendidikan, khususnya guru. Dari 390 sekolah di atas, Rosmana dkk., (2023) menemukan kesiapan pada salah satu sekolah dasar tersebut belum memadai, hal itu dilihat dari kesulitan guru dalam mengenali secara mendalam tiap peserta didik. Padahal salah satu karakteristik dari kurikulum tersebut adalah konsep merdeka belajar bagi peserta didik, di mana peserta didik memiliki hak untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka sesuai minat mereka, sehingga guru dituntut untuk memahami kepribadian masing-masing peserta didik. Kendala lain dalam implementasi kurikulum merdeka diperoleh peneliti dalam studi pendahuluan melalui wawancara dengan beberapa guru sekolah dasar di Purwakarta. Ditemukan bahwa guru mengalami kendala merancang perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dikaji lebih lanjut terkait implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar guna mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam implementasinya, sehingga dapat menjadi bahan refleksi bagi

elemen pendidikan yang terkait. Beberapa peneliti terdahulu telah meneliti terkait implementasi kurikulum, diantaranya Yusrina dkk (2018) mengkaji implementasi pembelajaran tematik dan kebutuhan guru dalam implementasinya di sekolah dasar. Dalam penelitiannya ia menemukan bahwa guru menghadapi kendala dalam hal merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pelaksanaan pembelajaran, proses asesmen, dan pengembangan materi pada setiap mata pelajaran dalam implementasi Kurikulum 2013. Hal senada ditemukan pada penelitian Nuraini & Abidin (2020) yang mengkaji hambatan yang dihadapi oleh guru di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah dalam menjalankan pembelajaran tematik terintegratif. Dalam penelitiannya ia menemukan bahwa guru terkendala dalam merancang RPP, proses penilaian, keterampilan membuat media pembelajaran atau menggunakan media pembelajaran berbasis elektronik, dan memadukan setiap konsep mata pelajaran menjadi satu tema. Kedua penelitian tersebut mengkaji terkait perencanaan pembelajaran dan penilaian hasil belajar pada Kurikulum 2013, sementara pada penelitian ini akan mengkaji perencanaan pembelajaran, perencanaan asesmen, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan asesmen pada kurikulum merdeka.

Selain kedua penelitian tersebut, Arif & Sulistianah (2019) mengkaji kendala-kendala yang dialami oleh guru dalam penerapan kurikulum 2013. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa guru terkendala dalam melakukan penilaian hasil pembelajaran pada Kurikulum 2013, di samping itu ditemukan juga kendala terkait distribusi buku pelajaran yang kurang maksimal di tahun 2013, dan pengisian raport peserta didik. Hal tersebut relevan dengan penelitian Rahmawati (2018) yang mengkaji terkait kendala yang dihadapi guru dalam penerapan kurikulum 2013 revisi di SD. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa penilaian hasil belajar menjadi kendala dominan yang dihadapi guru ketika implementasi Kurikulum 2013. Kedua penelitian di atas mengkaji tentang penilaian hasil belajar di Kurikulum 2013, namun tidak mengkaji tentang RPP. Sementara pada penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif mulai dari perencanaan pembelajaran dan asesmen, serta pelaksanaan pembelajaran dan asesmen pada kurikulum merdeka.

Atas dasar berbagai temuan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait **“Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar”**.

Novelty penelitian ini yaitu berfokus pada perencanaan pembelajaran dan asesmen, serta pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan asesmen dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang terfokus pada perencanaan pembelajaran dan proses penilaian dalam implementasi Kurikulum 2013. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi strategi guru dalam mengatasi masalah implementasi kurikulum merdeka, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih konkret dalam upaya meningkatkan implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar. Harapannya, hasil penelitian ini dapat secara komprehensif mendeskripsikan implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar, mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh guru, dan menawarkan strategi untuk mengatasinya. Dengan demikian, diharapkan temuan pada penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas implementasi kurikulum merdeka, dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

B. Fokus Penelitian

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini berfokus pada implementasi kurikulum merdeka dengan subfokus:

1. Perencanaan pembelajaran dan asesmen.
2. Pelaksanaan pembelajaran dan asesmen.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran dan asesmen di sekolah dasar dalam implementasi kurikulum merdeka?
2. Bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen di sekolah dasar dalam implementasi kurikulum merdeka?
3. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dan asesmen di sekolah dasar dalam implementasi kurikulum merdeka?

4. Bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar?

D. Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan penelitian yang telah diuraikan, harapannya penelitian ini akan memberikan manfaat yang signifikan dalam konteks teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai sumber referensi yang berharga bagi penelitian-penelitian mendatang yang terkait dengan kurikulum merdeka, terutama dalam hal implementasinya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan bahwa penelitian ini mampu meningkatkan pemahaman terkait Implementasi kurikulum merdeka, khususnya dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta asesmen.

b. Bagi guru dan kepala sekolah

Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan baru yang berharga dan menjadi bahan refleksi yang berarti dalam implementasi kurikulum merdeka, terutama dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta asesmen